PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMP NEGERI 2 KOTA PONTIANAK

TESIS

Oleh:

FITRIANI S.

NIM F2171241023

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2026

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMP NEGERI 2 KOTA PONTIANAK

TESIS

Diajuakan sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister
Pada Jurusan Ilmu Pendidikan
Program Studi Magister Administrasi Pendidikan

Oleh:
FITRIANI S.
NIM F2171241023

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2026

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMP NEGERI 2 KOTA PONTIANAK

TESIS

Tanggung Jawab Yuridis

FITRIANI S.
NIM F2171241023

Disahkan

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. M. Asrori, M.Pd	**Dr. Halida, M.Pd**
NIP. 19610527 198503 1 008	**NIP. 19740522 200604 2 001**

Penguji I	Penguji II
Dr. Eny Enawaty, M.Si	**Dr. Amrazi Zakso. M.Pd**
NIP. 19660524 199202 2 002	**NIP. 19630109 198703 1 003**

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas TanjungPura Pontianak

Prof. Dr. Ahmad Yani T., M.Pd
NIP. 19660401 199102 1 001

Lulus ujian tesis pada tanggal: 9 Maret 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMP NEGERI 2 KOTA PONTIANAK

TESIS

Tanggung Jawab Yuridis

FITRIANI S.
NIM F2171241023

Disetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. M. Asrori, M.Pd	**Dr. Halida, M.Pd**
NIP. 19610527 198503 1 008	**NIP. 19740522 200604 2 001**

Mengetahui
Plt. Ketua Program Studi Magister administrasi Pendidikan
FKIP Universitas TanjungPura

Dr. Afandi, M.Pd
NIP. 19870528 200812 1 002

Lulus ujian tesis pada tanggal: 9 Maret 2026

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMP NEGERI 2 KOTA PONTIANAK

KELAYAKAN TESIS

Tanggung Jawab Yuridis

FITRIANI S.
NIM F2171241023

Disahkan

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. M. Asrori, M.Pd	**Dr. Halida, M.Pd**
NIP. 19610527 198503 1 008	**NIP. 19740522 200604 2 001**

Penguji I	Penguji II
Dr. Eny Enawaty, M.Si	**Dr. Amrazi Zakso. M.Pd**
NIP. 19660524 199202 2 002	**NIP. 19630109 198703 1 003**

Mengetahui
Plt. Ketua Program Studi Magister Administrasi Pendidikan
FKIP Universitas TanjungPura

Dr. Afandi, M.Pd
NIP. 19870528 200812 1 002

Lulus ujian kelayakan tesis pada tanggal: 24 Pebruari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMP NEGERI 2 KOTA PONTIANAK

KELAYAKAN TESIS

Tanggung Jawab Yuridis

FITRIANI S.
NIM F2171241023

Disetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. M. Asrori, M.Pd	**Dr. Halida, M.Pd**
NIP. 19610527 198503 1 008	**NIP. 19740522 200604 2 001**

Mengetahui
Plt. Ketua Program Studi Magister Administrasi Pendidikan
FKIP Universitas TanjungPura

Dr. Afandi, M.Pd
NIP. 19870528 200812 1 002

Lulus ujian kelayakan tesis pada tanggal: 24 Pebruari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRIANI S.

NIM : F2171241023

Jurusan/Prodi : Keguruan Dan Ilmu Pendidikan/Administrasi Pendidikan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemuan hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan saya bersedia menerima sanki atas perbuatan tersebut.

Pontianak, Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



FITRIANI S.

NIM. F2171211023

ABSTRAK

Fitriani S., 2026. Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 2 Kota Pontianak.
Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. M. Asrori, M.Pd., (2) Dr. Halida, M.Pd

Kata Kunci **:** Peran Kepala Sekolah, Meningkatkan Pendidikan, Pendidikan Inklusif

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran kepala sekolah dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 2 Kota Pontianak. Fokus penelitian diarahkan pada peran kepala sekolah sebagai perencana *(planner),* pengorganisasi *(organizer)*, pemimpin *(leader)*, pengendali *(controller)*, dan penghubung *(liaison)* dalam mendukung layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru pembimbing khusus, guru mata pelajaran, serta peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah telah melaksanakan perannya sebagai perencana *(planner)* dengan menyusun program dan kebijakan sekolah yang mendukung pendidikan inklusif. Dalam peran pengorganisasi *(organizer)*, kepala sekolah mengoordinasikan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai pemimpin *(leader)*, kepala sekolah memberikan arahan, motivasi, serta dukungan kepada guru dalam pelaksanaan pembelajaran inklusif. Peran pengendali *(controller)*, diwujudkan melalui kegiatan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program inklusi. Selain itu, kepala sekolah juga berperan sebagai penghubung *(liaison),* dengan menjalin kerja sama antara wali kelas, guru mata pelajaran, guru BK, guru pendamping khusus, orang tua, dan lembaga terkait dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus serta meningkatan kompetensi guru. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah sangat berperan dan memiliki kontribusi dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi kepala sekolah serta dukungan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan agar pendidikan inklusif dapat terlaksana dengan baik dan semakin optimal.

ABSTRACT

***Fitriani S., 2026**. The Role of the School Principal in Improving Inclusive Education at SMP Negeri 2 Kota Pontianak.*
Advisors: (1) Prof. Dr. H. M. Asrori, M.Pd., (2) Dr. Halida, M.Pd

***Keywords:** Principal's Role, Improving Education, Inclusive Education*

This study aims to describe and analyze the role of the principal in improving the implementation of inclusive education at SMP Negeri 2 Pontianak. The focus of the study is directed at the principal's role as a planner, organizer, leader, controller, and liaison in supporting educational services for students with special needs. This research employed a qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The research informants included the principal, vice principal, special education teachers, subject teachers, and students. The results of the study indicate that the principal has carried out the role as a planner by developing school programs and policies that support inclusive education. In the role as an organizer, the principal coordinates teachers and educational staff according to their duties and functions. As a leader, the principal provides direction, motivation, and support to teachers in implementing inclusive learning. The role as a controller is manifested through supervision and evaluation activities of the implementation of inclusive programs. In addition, the principal also acts as a liaison by establishing cooperation among homeroom teachers, subject teachers, counseling teachers, special assistant teachers, parents, and related institutions in addressing the needs of students with special needs as well as improving teachers' competencies. Based on these findings, it can be concluded that the principal plays a significant role and contributes to improving the quality of inclusive education implementation. Therefore, strengthening the competence of school principals and continuous support from all stakeholders are needed so that inclusive education can be implemented effectively and optimally.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan YME, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul "**Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 2 Kota Pontianak**" dan dapat selesai tepat pada waktunya.

Tesis ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister pada Jurusan Ilmu Pendidikan Prodi Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Adapun pada tesis ini terdapat Lima Bab, yaitu Bab I Pendahuluan (Latar Belakang, Fokus dan Pertnyaan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional), Bab II Kajian Teoritis, Bab III Metode Penelitian (Jenis Peneltian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Pengecekan Keabsahan).

Penulis menyadari sepenuuhnya bahwa penyusunan proposal penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi memperbaiki proposal penelitian ini sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan legi lebih lanjut.

Pontianak, Maret 2026

Fitriani S.
NIM F2171241023

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan dan penyelesain penulisan proposal tesis ini, penulis mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Asrori, M.Pd, selaku Pembimbing Pertama, yang dengan penuh kesabaran dan perhatian telah memberi arahan, bimbingan dan saran yang berharga sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Dr. Halida, M.Pd, selaku Pembimbing Kedua, yang dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian dalam membimbing dan memotivasi sehingga tesis ini dapat teselesaikan dengan baik.
3. Penguji Pertama Bapak Dr. Eny Enawati, M.Si, yang telah mengarahkan dan memberi masukan dalam penulisan tesis ini.
4. Penguji Kedua Dr. Amrazi Zakso, M.Pd, yang telah mengarahkan dan memberi masukan dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Ahmad Yani T, M.Pd., selaku Dekan FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan bantuan, fasilitas, dan informasi serta motivasi yang sangat bermanfaat selama penulis menyelesaikan pendidikan.
6. Bapak Effendi, S.Pd., selaku staff Program Studi Magister Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Tanjungpura, yang mendukung dalam perlengkapan administrasi selama penelitian ini.
7. Ibu Erna, S.Pd., selaku Plt. Kepala SMP Negeri 2 Kota Pontianak, yang sudah memberikan izin riset.

8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar di Program Studi Magister Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah banyak membagikan ilmunya.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Tajungpura Pontianak Angkatan 2024, yang selalu solid dan memberikan dukungan.
10. Seluruh keluarga besar, Suami, Anak, Kedua Orang Tua, Abang, Adik dan Keponakan, yang selalu memberikan perhatian, pengertian, motivasi, do'a dan dukungan penuh selama penulis mengikuti perkulihan sampai menyelesaikan tesis ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membentu sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

UCAPAN TERIMA KASIH iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR BAGAN xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Kegunaan Penelitian 11

E. Definisi Operasional 12

BAB II KAJIAN TEORITIS 15

A. Kepala Sekolah 15

1. Pengertian Kepala Sekolah 15

2. Tugas, Peran dan Fungsi Kepala Sekolah 18

a. Tugas Kepala Sekolah 18

b. Peran dan Fungsi Kepala Sekolah 20

3. Kompetensi Kepala Sekolah 24
B. Pendidikan Inklusif 28
1. Kebijakan Pendidikan Inklusif 28
2. Pengertian Pendidikan Inklusif 31
3. Tujuan dan Prinsip Pendidikan Inklusif 34
4. Pelaksanaan dan Manajemen Pendidikan Inklusif 36
C. Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Pendidikan Inklusif 42
D. Telaah Penelitian Terdahulu 45
BAB III METODE PENELITIAN 48
A. Jenis Penelitian 48
B. Kehadiran Peneliti 50
C. Lokasi Penelitian 50
D. Sumber Data 50
E. Prosedur Pengumpulan Data 51
F. Teknik Analisis Data 55
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 59
A. Hasil Penelitian 59
1. Peran Kepala Sekolah sebagai Perencana (*Planner*) 60
2. Peran Kepala Sekolah sebagai Pengorganisasian (*organizer*) 80
3. Peran Kepala Sekolah sebagai Pemimpin (*Leader*) 97
4. Peran Kepala Sekolah sebagai Pengendali (*Controller*)..... 108
5. Peran Kepala Sekolah sebagai Penghubung (*Liaison*) 123

B. Pembahasan Penelitian 133

1. Peran Kepala Sekolah sebagai Perencana (*Planner*) 134

2. Peran Kepala Sekolah sebagai Pengorganisasian (*organizer*) 138

3. Peran Kepala Sekolah sebagai Pemimpin (*Leader*) 143

4. Peran Kepala Sekolah sebagai Pengendali (*Controller*)..... 147

5. Peran Kepala Sekolah sebagai Penghubung (*Liaison*) 151

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 155

A. Kesimpulan 155

B. Saran 157

DAFTAR PUSTAKA 159

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Data Partisipan di SMP Negeri 2 Kota Pontianak 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Rapat Perencanaan Pendidikan Inklusif 61

Gambar 4.2. Wawancara Plt. Kepala Sekolah 62

Gambar 4.3. perencanaan Program Inklusif dalam KSP 79

Gambar 4.4. Rapat Pembagian Tugas Koordinator dan Guru Pendamping ABK 81

Gambar 4.5. Wawancara Wakil Kepala Sekolah 84

Gambar 4.6. Wawancara Peserta Didik Teman ABK 92

Gambar 4.7. Tim Guru Pendidikan Khusus 95

Gambar 4.8. Kepala Sekolah Berkoordinasi dengan BPMP dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak 97

Gambar 4.9. Wawancara Guru Pendamping Khusus 101

Gambar 4.10. Struktur Program Bimtek 107

Gambar 4.11. Plt. Kepala Sekolah Mengecek Administrasi GPK 109

Gambar 4.12. Wawancara Guru Mata Pelajaran 116

Gambar 4.13. Kesetaraan dalam Kegiatan Intarakurikuler 121

Gambar 4.14. Fasilitasi Kegiatan Bimtek 123

Gambar 4.15. Kolaborasi Orang Tua dengan Pihak Sekolah 132

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Alur Pelaksanaan Pendidikan Inklusif 38

Bagan 2.2. Manajemen Pendidikan Inklusif 40

Bagan 3.1. Kompenen Analisis Data Model Interaktif sumber oleh Miles dan Huberman 55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Kisi-Kisi Panduan Wawancara Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan GPK 164

Lampiran 2. Instrumen Kisi-Kisi Panduan Wawancara Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan GPK 170

Lampiran 3. Instrumen Kisi-Kisi Panduan Observasi 175

Lampiran 4. Hasil Wawancara Plt. Kepala Sekolah.....179

Lampiran 5. Hasil Wawancara Wakil Kepala Sekolah 183

Lampiran 6. Hasil Wawancara Guru Pendamping Khusus 188

Lampiran 7. Hasil Wawancara Guru Mata Pelajaran 194

Lampiran 8. Hasil Wawancara Peserta Didik.....199

Lampiran 9. Hasil Observasi 202

Lampiran 10. Hasil Dokumen Perencanaan 206

Lampiran 11. Hasil Dokumen Pengorganisasian 210

Lampiran 12. Hasil Dokumen Pemimpin 214

Lampiran 13. Hasil Dokumen Pengendali.....218

Lampiran 14. Hasil Dokumen Penghubung 223

Lampiran 15. Dokumentasi Kegiatan Penelitian 228

Lampiran 16. ABK dan Calom ABK 231

Lampiran 17. Program Pembelajaran Individu (PPI) 233

Lampiran 18. Riwayat Peneliti 235

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bagian penting dalam membentuk keterampilan dan moral. Pendidikan merupakan sarana utama untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi peserta didik tanpa terkecuali. Pendidikan adalah usaha yang sadar dilakukan untuk mempengaruhi dan membantu perkembangan manusia dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, fisik, dan moral. Tujuan utama pendidikan adalah membantu individu mencapai potensi tertinggi mereka secara bertahap.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bab XIII tentang Pendidikan pada Pasal 31 No. 1 berisikan "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran", dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab III Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4 No. 1, di dalamnya menyebutkan "Pendidikan diselengggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Dalam pelaksanaanya, pendidikan harus menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman peserta didik dan memenuhi kebutuhan semua peserta didik. Maka dari itu peserta didik yang berkebutuhan khusus juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik yang sudah difasilitasi pemerintah.

Di Indonesia, kebijakan pendidikan inklusif diatur oleh beberapa peraturan, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, yang mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah umum serta standar pelayanan dan dukungan untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Selain itu, hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas ditekankan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kutipan dari UNESCO (2005, h.9) "*Inclusion as we know it today has its origins in Special Education. The development of the fi eld of special education has involved a series of stages during which education systems have explored different ways of responding to children with disabilities, and to students who experience diffi culties in learning."*. Artinya "Inklusi sebagaimana kita kenal saat ini berakar dari pendidikan khusus. Perkembangan bidang pendidikan khusus telah melalui serangkaian tahapan, di mana sistem pendidikan mengeksplorasi berbagai cara dalam merespons anak-anak penyandang disabilitas serta peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar.

Kutipan UNISCO (2005, h.11):

> *Education must be viewed as a facilitator in everyone's human development and functionality, regardless of barriers of any kind, physical or otherwise. Therefore, disability of any kind (physical, social and/or emotional) cannot be a disqualifi er. Inclusion, thus, involves adopting a broad vision of Education for All by addressing the spectrum of needs of all learners, including those who are vulnerable to marginalisation and exclusion.*

Artinya Pendidikan harus dipandang sebagai sarana yang memfasilitasi perkembangan dan keberfungsian manusia bagi setiap individu, tanpa

memandang adanya hambatan apa pun, baik fisik maupun nonfisik. Oleh karena itu, disabilitas dalam bentuk apa pun—baik fisik, sosial, maupun emosional—tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan seseorang. Dengan demikian, inklusi mencakup penerapan visi luas *Education for All* dengan merespons spektrum kebutuhan seluruh peserta didik, termasuk mereka yang rentan terhadap marjinalisasi dan eksklusi.

Pada buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif, Arriani, F., dkk. (2022, h.4) menuliskan bahwa:

> Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Kepala sekolah yaitu sosok yang diberi amanah dan kewenangan oleh banyak orang (anak buah) untuk membawa sekolah ke arah tujuan yang ingin dicapai. Pimpinan harus menunjukkan sikap teladannya agar dapat meningkat mutu lembaga pendidikannya (Sutikno, 2021, h.10). Berdasarkan pendapat tersebut maka pimpinan mempunyai peran untuk meningkatkan mutu pendidikan. Contoh pimpinan di lembaga pendidikan misalnya kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki peran untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga yang dipimpinnya yaitu sekolah.

Dalam penyelenggaran pendidikan inklusif, kepala sekolah dituntut untuk memiliki kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung penggembangan dan pelayanan pendidikan inklusif. Untuk itu, dalam ikhtiar untuk mengembangkan pendidikan inklusif secara sukses pada sekolah, kepala sekolah memiliki peran

yang sangat vital dan strategis. Kepala sekolah mesti bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan inklusif. Bentuk tanggung jawab dan upaya pencapai keberhasilan tersebut dapat dilihat dari program-program yang dibuat, realisasi, dan evaluasi yang dilakukan mengenai pendidikan inklusif.

Menurut Ridloah, S., dkk. (2024, h.4) “Peran Manajer Pendidikan atau kepala sekolah diantaranya adalah sebagai perencana, pengorganisasi, pemimpin, pengendali, dan penghubung.” Kepala sekolah harus memiliki perencanaan yang baik, mampu mengelola sumber daya dengan baik, memiliki jiwa kepempinan, mampu memantau dan mengevaluasi kinerja dan sebagai penghubung antar lembaga atau memfasilitasi guru dan staf untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan kompetensi dan hasil akhirnya meningkatkan kualitas sekolah.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono dan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak saat membuka bimtek sekolah inklusi, Senin (04/10/2021) mengatakan sekolah inklusif percontohan di Kota Pontianak sudah ada sejak tahun 2020 yang lalu. Jumlahnya enam sekolah percontohan tersebut yakni 2 TK/PAUD, 2 SD dan 2 SMP. Dengan rincian PAUD Terpadu Pontianak Barat dan TK Jl Selayar Pontianak Selatan, SDN 06 dan SDN 34 Pontianak Selatan serta SMPN 2 Kota Pontianak dan SMPN 23 Kota Pontianak.

Pada tahun 2021 Kota Pontianak menargetkan 36 sekolah yang akan melaksanakan sekolah inklusi. Sebagai persiapan, para guru mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP mengikuti bimbingan teknis (bimtek). Bimtek ini untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada guru-guru, mempersiapkan

sekolah inklusif, jika ada anak berkebutuhan khusus yang diterima di sekolah itu. Pada tahun 2023, Pontianak menargetkan bahwa semua sekolah ada sekolah inklusif. Sekolah inklusif merupakan tempat bagi anak berkebutuhan khusus, dapat belajar bersama dengan anak-anak reguler lainnya. Tentu dengan adanya guru pendamping selama kegiatan belajar mengajar.

Selanjutnya pada Rabu, 19 Maret 2025 Pemerintah Kota Pontianak Perkuat Pendidikan Inklusi dengan kembali menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) bagi guru-guru sekolah inklusi. Program itu merupakan upaya Pemerintah Kota Pontianak untuk memastikan anak-anak disabilitas mendapatkan hak pendidikan yang sama di sekolah umum. Anak disabilitas punya hak untuk masuk sekolah umum dengan batasan-batasan tertentu. Mereka akan diperiksa oleh Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center (UPT-LDAC), untuk menentukan apakah bisa mengikuti pembelajaran di sekolah umum atau harus masuk Sekolah Luar Biasa (SLB).

Setelah pelaksanaan bimtek ini, seluruh sekolah di Kota Pontianak adalah sekolah inklusi. Artinya, tidak boleh ada sekolah yang menolak anak berkebutuhan khusus, kecuali yang sangat parah yang memang harus bersekolah di SLB. Saat ini, Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI) di Kota Pontianak berjumlah 223 Satuan Pendidikan (SP), dengan rincian PAUD/TK 76 SP, SD 113 SP, SMP 33 SP dan SP Non Formal 1 SP. Dengan adanya program ini, diharapkan semua anak, termasuk anak disabilitas, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dan setara di Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk terus mendukung pendidikan

inklusif sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Namun pada kenyataannya belum semua sekolah melakukan pendidikan inklusif dengan optimal. Hanya beberapa guru saja yang mendapat pelatihan. Sebagian besar guru masih menyamaratakan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Kepala sekolah juga tidak mendapatkan pembimbingan khusus, sehingga kurang paham, dan tidak semua kepala sekolah berperan dalam pendidikan inklusif, karena kurangnya pemahaman. Seperti hanya satu syarat saja, namun tidak melakukan dengan maksimal.

Untuk melaksanakan program pendidikan inklusif, maka berbagai komponen pendidikan yang biasannya digunakan dalam oprasionalisasi kegiatan pendidikan perlu disesuaikan dengan visi misi pendidikan inklusif. Selain itu juga ada beberapa komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pendidikan inklusif antara lain, regulasi yang kuat untuk menjadi landasan pelaksanaan program ini, kurikulum yang berdiferensiasi dan berdasarkan kebutuan peserta didik, metode dan strategi pembelajaran yang akomodatif dan variatif, evaluatif yang komperhensif, sarana dan prasarana yang mendukung, dan penyedian tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi yang handal. Semua komponen tersebut dalam pelakasanaan program tersebut secra makro memerlukan adanya sebuah manajemen yang profesional.

Kepemimpinan kepala sekolah dalam penyokong pendidikan inklusif, ini ditandai dengan kemampuan kepala sekolah untuk memberikan visi yang jelas tentang pentingnya pendidikan inklusif, serta kemampuannya untuk

menginspirasi dan menginspirasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah (Putranti, N. D., dkk. 2024). Kepala sekolah sebagai pemimpin utama di sekolah memiliki tanggung jawab penting dalam membentuk budaya inklusif, mendorong perubahan positif, dan memberdayakan staf untuk memberikan layanan pendidikan yang setara bagi semua siswa (Pasaribu, R., dkk. 2023).

Menurut Yustina (2023, h.30) "Kepala sekolah sebagai figur kunci dalam mendorong perkembangan kemajuan sekolah". Menurut Rusmini (2026, h.4) "Sebagai pemimpin, kepala sekolah memberikan arahan dan dukungan yang jelas kepada guru untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilannya".

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan wawancara dengan Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Asesmen Center (UPT-LDAC), sejauh ini SMP Negeri 2 Kota Pontiank merupakan salah satu sekolah percontohan yang berhasil dalam menyelenggaran pendidikan inklusif. Karena sudah beberapa kali menerima beberapa penghargaan dan di kirim ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan. Jenis penghargaan yang diperoleh yaitu 1) Peringkat 1 atas Layanan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Inklusif di Provinsi Kalimanatan Barat pada Penganugrahan *Iclusive education Award* Tahun 2024; 2) Diberikan kepada Kepala Sekolah Bapak Yudi Herdiana, S.Pd., M.Pd., atas Dedikasi dalam Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama bagi Peserat Didik Berkebutuhan Khusus dan/atau Penyandang Disabilitas pada Penganugrahan *Iclusive education Award* Tahun 2024.

SMP Negeri 2 Kota Pontianak juga memiliki vasilitas yang mendukung untuk anak berkebutuhan khusus. Seperti akses tangga untuk kursi roda, kamar

kecil yang bersahabat untuk anak disabilitas, kursi roda dan masih ada fasilitas lainnya. Guru Pendamping Khusus (GPK) juga aktif dalam membuat administrasi anak berkebutuhan khusus. Fokus anak berkebutuhan khusus yang bisa masuk di sekolah reguler dengan salah satu syaratnya sudah mendapat rekomendasi dari LDAC dengan IQ minimal 70.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang bisa masuk di sekolah reguler adalah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan hambatan ringan hingga sedang, seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa, ADHD, autisme fungsional tinggi, atau lamban belajar *(slow learner),* dapat bersekolah di sekolah reguler melalui sistem pendidikan inklusi. Mereka belajar bersama peserta didik umum, sering kali di dampingi guru pendamping khusus (GPK).

Berikut adalah beberapa jenis ABK yang masih bisa bersekolah di sekolah reguler (inklusi):

1. Tunadaksa (Disabilitas Fisik): Anak dengan gangguan fisik namun memiliki kognitif yang memadai untuk mengikuti pelajaran.
2. Tunanetra (Hambatan Penglihatan): Anak yang memiliki gangguan penglihatan tetapi mampu belajar dengan alat bantu (seperti *braille* atau alat bantu dengar).
3. Tunarungu (Hambatan Pendengaran): Anak dengan gangguan pendengaran ringan hingga sedang, biasanya sudah menggunakan alat bantu dengar dan mampu berkomunikasi.

4. ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*): Anak yang hiperaktif atau sulit fokus, namun jika perilakunya bisa dikelola, dapat belajar di kelas reguler.
5. Autisme (Fungsional Tinggi): Anak autis dengan kemampuan komunikasi dan kognitif yang cukup baik, serta dapat berinteraksi sosial secara terbatas.
6. Lambat Belajar (*Slow Learner*): Anak yang memiliki kecepatan belajar lebih lambat dari rata-rata, tetapi masih dalam kategori mampu mengikuti kurikulum yang disesuaikan.
7. Kesulitan Belajar Spesifik**:** Anak dengan disleksia (kesulitan membaca), diskalkulia (matematika), atau disgrafia (menulis)

Berdasarkan penghargaan yang didapatkan di SMP Negeri 2 Kota Pontianak dan fasilitas sekolah yang mendukung tersebut, tujuan peneliti untuk mengatahui sejauh mana "Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatakan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 2 Kota Pontianak", agar menjadi bahan acuan dan referensi sekolah lain khususnya sekolah di Kota Pontianak untuk menerapkan pendidikan inklusif, karena tujuan dari Pemerintah Kota Pontianak semua sekolah adalah sekolah inklusif.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan luasnya cakupan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah "Peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan pendidikan inklusif di SMP Negeri 2 Kota Pontianak". Berdasarkan fokus penelitian tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran kepala sekolah sebagai perencana *(planner)* dalam meningkatkan pendidikan inklusif di SMP Negeri 2 Kota Pontianak?
2. Bagaimanakah peran kepala sekolah sebagai pengorganisasi *(organizer)* dalam meningkatkan pendidikan inklusif di SMP Negeri 2 Kota Pontianak?
3. Bagaimanakah peran kepala sekolah sebagai pemimpin *(leader)* dalam meningkatkan pendidikan inklusif di SMP Negeri 2 Kota Pontianak?
4. Bagaimanakah peran kepala sekolah sebagai pengendali *(controller)* dalam meningkatkan pendidikan inklusif di SMP Negeri 2 Kota Pontianak?
5. Bagaimanakah peran kepala sekolah sebagai penghubung *(liaison)* dalam meningkatkan pendidikan inklusif di SMP Negeri 2 Kota Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil fokus penelitian, maka tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi objektif dan mendeskripsikan tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan pendidikan inklusif di SMP Negeri 2 Kota Pontianak. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi objektif dan mendeskripsikan tentang:

1. Peran kepala sekolah sebagai perencana *(planner)* dalam meningkatkan pendidikan inklusif di SMP Negeri 2 Kota Pontianak.
2. Peran kepala sekolah sebagai pengorganisasi *(organizer)* dalam meningkatkan pendidikan inklusif di SMP Negeri 2 Kota Pontianak.
3. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin *(leader)* dalam meningkatkan pendidikan inklusif di SMP Negeri 2 Kota Pontianak.

4. Peran kepala sekolah sebagai pengendali *(controller)* dalam meningkatkan pendidikan inklusif di SMP Negeri 2 Kota Pontianak.
5. Peran kepala sekolah sebagai penghubung *(liaison)* dalam meningkatkan pendidikan inklusif di SMP Negeri 2 Kota Pontianak.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi teori Administrasi Pendidikan, khususnya peran kepala sekolah dalam meningkatkan pendidikan inklusif.

2. Manfaat Praktis
   a. Bagi guru, hasi penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman, serta kesiapan guru dalam menghadapai peserta didik yang berkebutuhan khusus.
   b. Bagi murid, hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu untuk saling menghargai satu sama lain, antara peserta didik.
   c. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan peningkatan peran kepala sekolah dalam mengoptimalkan pendidikan iklusif di sekolah.
   d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referansi untuk memberikan gambaran dalam penelitian lain yang sesuai dan sejenis.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan rinci mengenai bagaimana variabel-variabel dalam penelitian diukur, diterapkan, dan diamati secara nyata sesuai dengan tujuan penelitian. Penjelasan singkat mengenai fokus beberapa variabel dalam penelitian ini. Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Sekolah

   Kepala sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru yang ditunjuk untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, administrasi sekolah, dan pembinaan tenaga kependidikan.

2. Pendidikan Inklusif

   Pendidikan Inklusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi: karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya dan lain sebagainya. Namun lebih fokus dalam penelitian ini di SMP Negeri 2 Kota Pontianak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan potensi kognitif yang memadai, gangguan ringan, atau fungsional dapat bersekolah di sekolah reguler melalui sistem sekolah inklusif. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang umumnya bisa beradaptasi di sekolah reguler meliputi disabilitas fisik/daksa, tunanetra/rungu ringan, kesulitan belajar spesifik, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (ADHD/GPPH), autisme ringan, dan lamban belajar (*slow learner*).

3. Peran Manajer Pendidikan (Kepala Sekolah) dalam pendidikan inklusi sebagai berikut:
   a. Perencana *(Planner)* yang dimaksud dalam penelitian ini: Kepala sekolah merancang rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang bersama wakil kepala sekolah, dewan guru dan staff. Rencana ini mencakup penyusunan kurikulum Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), program pengembangan ABK, alokasi sumber daya untuk ABK, dan strategi peningkatan mutu Pendidikan dan lainnya yang dibutuhan untuk ABK.
   b. Pengorganisasi *(Organizer)* yang dimaksud dalam penelitian ini: Kepala sekolah mengatur dan mengelola sumber daya manusia baik guru pendamping ABK yaitu Guru Pendamping Khusus (GPK), fisik berupa bangunan atau sarana dan prasarana yang mendukung ABK, dan finansial untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan ABK. Pengorganisasian mencakup penentuan tugas guru, pendelegasian wewenang kepada guru pendamping ABK yaitu GPK, dan penyusunan struktur organisasi yang efektif untuk progaram ABK.
   c. Pemimpin *(Leader)* yang dimaksud dalam penelitian ini: Kepala sekolah harus bisa memotivasi dan membimbing guru dan staf, serta memimpin pendidikan untuk mencapai tujuan lembaga. Kepala sekolah mengembangkan budaya kerja yang positif, meningkatkan kinerja staf, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan ramah terdahap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

d. Pengendali *(Controller)* yang dimaksud dalam penelitian ini: Kepala sekolah bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi kinerja guru dan staf secara keseluruhan. Kepala sekolah harus memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai sesuai dengan standar yang diharapkan (pendidikan inklusif).
e. Penghubung *(Liaison)* yang dimaksud dalam penelitian ini: Kepala sekolah bertindak sebagai penghubung antara guru dan staf dengan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, orang tua, dan organisasi lainnya. Kepala sekolah mampu menjalin hubungan yang baik untuk mendukung pencapaian tujuan Pendidikan (sekolah inklusif).